

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN DI DESA SEKODI KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh

Rezky Susanti

E-mail: RezkySusantiunri@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Basri, M.Si

**Jurusan Sosiologi- Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax.0761-6377**

ABSTRACT

Rural infrastructure development in the Sekodi Village of Bengkalis District that through with one of local government programs in Bengkalis Regency than knowns as Regent Instruction Strengthening Rural Infrastructure Program "INBUP-PPIP" which aims to support efforts to tackle poverty and underdevelopment in rural infrastructure in Bengkalis, so as to more increase community empowerment in the development, the power rural assistance village known as Village development Assistants to provide guidance, coaching, and supervision and management of existing development activities in the village administration in particular the implementation of INBUP-PPIP and community participation is needed in determining the direction of and development priorities in order to achieve a common goal.

The author takes the phenomenon of research on the effectiveness of Rural Assistance and community participation in rural infrastructure development to determine the public's assessment of the effectiveness of Rural Assistance, as well as public participation in the development of rural infrastructure in the Sekodi village, this study used a quantitative descriptive analysis and establish a sample of 71 people Head Families (HF) were taken from every Cluster in the village sekodi namely: Cluster in Tanjung sekodi 15% x197HF= 30 people, 15% Cluster in Nyatuh x169 HF = 25 people, cluster in Permai 15% x 109 HF = 16 people.

The results showed that, People consider that Rural Assistance still less effective that show in terms of presence on duty in the village, facilitation of planning, implementation, monitoring, communication, still considered less good, although that some people have assessed the development of socialization, planning assistance, ability, and responsibility, results in the presence of a companion rural development in the construction of the village was considered quite good companion, even the public judge for sustainability of care in the village is still part of the population (respondents) who agreed to 45.1% and the others were agreed 45.1% and 9.9% did not agree. while participation in the development of rural infrastructure in sekodi Village still moderate that show of participation in the meetings, mutual assistance, self-power, responsibility,

supervision, delivery cheating, keep the fruits of development, utilization of the results, as well as overseeing the development was considered quite active, although the submission of ideas (the proposed development), self-funding, self-help materials assessed to be less active.

Keywords: Rural Assistance, Participation, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan beranjak dari kenyataan bahwa persoalan dasar pembangunan itu sendiri pada hakekatnya berada di pedesaan. Sebagian besar penduduk hidup dan bermukim di pedesaan seperti Peninjauan melalui Badan Pusat Statistik Indonesia (2012) dari hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa yang mencakup mereka yang tinggal di daerah perkotaan 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan didaerah pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Data perbandingan penduduk ini merupakan angka yang menggambarkan bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk indonesia di pedesaan tetap lebih besar dibandingkan perkotaan, walaupun terjadi urbanisasi.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Melalui Pemberdayaan khusus salah satunya program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) yang melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan

pembangunan. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan khusus di bidang Pembangunan ini dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur pedesaan, program ini dispesifikasikan dengan nama Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (INBUP-PPIP

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa khususnya, maka disalurkan Tenaga Pendamping Desa Pembangunan di seluruh desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pendamping desa yang disalurkan berguna sebagai orang yang mendampingi masyarakat dalam membangun desa. Penyaluran tenaga pendamping desa ini dilaksanakan sejak tahun 2012 dan sampai tahun 2014 masih di laksanakan pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur desa secara khusus melalui program INBUP-PPIP. Pendamping Desa Pembangunan di dalam buku petunjuk teknis INBUP-PPIP adalah orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan bimbingan, pembinaan

dan pengawasan atas pengelolaan kegiatan pembangunan yang ada pada pemerintahan desa di antaranya INBUP-PPIP, dan ADD.

Pembangunan secara inklusif dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama (sentral) pembangunan adalah pilihan yang tepat, karena hanya masyarakat desa itu sendiri yang paling tahu apa kebutuhan dan keinginan program yang ingin dibangun, yang pastinya berorientasi untuk menunjang kemajuan masyarakat desa itu sendiri secara kolektif bukan individual. Analisis secara pendekatan pembangunan ini tidak hanya *Bottom-Up* saja karena masih terdapat alokasi-alokasi anggaran dalam pembangunan ini telah di prioritaskan untuk pembangunan tertentu sehingga unsur *Bottom-up* dan *Top-down Planning* bergabung menjadi suatu perencanaan pembangunan yang sinergis dan ini bisa menunjang keefektifan program pembangunan.

Desa Sekodi memiliki 3 Dusun yakni Dusun Tanjung Sekodi, Dusun Nyatuh, dan Dusun Permai, jumlah penduduk Desa Sekodi 1836 jiwa meliputi 962 orang laki-laki, dan 874 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 475 KK. Program pembangunan yang masuk ke desa Sekodi sangat bervariasi baik program nasional maupun program daerah dari Pemda yang bertujuan untuk membangun desa serta meningkatkan produktivitas masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa,

namun kondisi Infrastruktur di Desa Sekodi sampai detik ini masih banyak yang perlu ditingkatkan, seharusnya dengan banyaknya program pembangunan yang masuk desa ini bisa mewujudkan desa sekodi lebih baik kondisi infrastrukturnya. Pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat penting selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah seorang pendamping desa adalah mitra masyarakat disebabkan masyarakat desa sebagai komunitas yang butuh pemberdayaan supaya mereka bisa mengerti akan pembangunan yang efektif dan terarah, dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diutamakan. Hal ini mengindikasikan bahwa apapun program pembangunan yang masuk desa apabila tidak ada pendampingan yang kuat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dan apabila masyarakat secara keseluruhan masih kurang tahu tentang program yang masuk desa maka ini akan menghambat perkembangan desa.

Apresiasi bagus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah menyalurkan Tenaga Pendamping khusus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Penyaluran pendampingan yang telah dilakukan dan sudah terlihat di tahun 2012 dan 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian

masyarakat terhadap efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Sekodi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang di di akan dikaji secara sosiologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Sekodi kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan sampel 71 Responden, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data sebagai pedoman penelitian untuk melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang baik dan terarah Dalam peneitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pendampingan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi

Efektivitas pendampingan desa di uraikan peneliti meliputi penilaian masyarakat terhadap kehadiran pendamping desa, sosialisasi program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemampuan, komunikasi pendamping desa, tanggung jawab, hasil pembangunan dengan adanya pendamping desa, hambatan pembangunan. Serta keberlanjutan

pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

Berikut ini peneliti mendeskripsikan efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, dalam hal ini melalui pelaksanaan kegiatan INBUP-PPIP di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan adanya Pendampingan Desa yang berjalan selama 2 periode yakni pada tahun 2012 dan tahun 2013.

1. Pengetahuan Masyaraat Tentang Keberadaan dan Kehadiran Pendamping Desa

Pengetahuan responden tentang keberadaan pendamping desa masih Kurang tahu dengan persentase 59.2% (42 responden) alasan yang mendasar adalah Pendamping Desa yang mereka ketahui kurang terlihat aktivitasnya di Desa, sehingga masyarakat merasa bahwa pendamping desa hanya mendekati struktur aparatur pemerintahan desa saja dan tidak intensif pada elemen masyarakat yang dibawah. Masyarakat yang Tahu tentang keberadaan pendamping desa sebesar 29.6% (21 responden) dan sangat tahu dengan persentase 11.3% (8 orang) hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pendamping desa cukup diketahui di Desa ini dan masyarakat terlihat terbuka dan memiliki harapan kemajuan pembangunan desa dengan adanya pendampingan desa di bidang pembangunan.

Responden menyatakan bahwa kehadiran pendamping desa pembangunan di Desa sekodi kurang baik dengan persentase 73.2% (52

orang) hal ini di dasari pertimbangan bahwa sebagian masyarakat mengetahui pendamping desa pembangunan hadir di desa dengan intensitas seminggu sekali, padahal seharusnya pendamping desa pembangunan harus ada di desa tempat ditugaskan pada setiap hari kerja yakni senin s/d juma't dengan jam kerja yang sudah ditentukan pemerintah, hampir sebagian responden mengetahui akan pentingnya kehadiran pendamping desa pembangunan di Desa dan seharusnya pendamping desa disiplin mengikuti peraturan itu.

2. Sosialisasi Pembangunan

Mayoritas responden merasakan bahwa sosialisasi pembangunan yang dilakukan pendamping desa sudah cukup baik dengan persentase 62.0% (44 orang) sudah baik dengan persentase 2.8% (2 orang) hal ini didasari bahwa masyarakat merasa bahwa pendamping desa telah memberikan penjelasan yang cukup walaupun begitu masih ada responden yang menilai bahwa sosialisasi pembangunan kurang baik dengan persentase 35.2% (25 orang) hal ini didasari oleh penilaian bahwa masih terdapat beberapa program yang kurang jelas tata cara pelaksanaannya, dan sosialisasi dinilai masih terlalu singkat waktunya bahkan tidak berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan kemampuan, menswadayakan serta

mengembangkan potensi masyarakat dan desa dalam pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dalam tiap pendampingan pembangunan yang dilakukan akan dijelaskan melalui uraian berikut ini:

a. Pendampingan Perencanaan Program Pembangunan

Responden telah merasa bahwa pendampingan dalam perencanaan program pembangunan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dinilai cukup baik dengan persentase 53.5% (38 orang) dan baik dengan persentase 2.8% (2 orang) dengan pertimbangan bahwa pendamping desa telah melakukan upaya pendampingan dalam merencanakan program pembangunan yang akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Responden yang menilai bahwa pendampingan dalam perencanaan pembangunan kurang baik dengan persentase 43.7% (31 orang) dengan beberapa alasan yakni adanya perencanaan yang sulit dimengerti dan dinilai kurang dibimbing secara berkelanjutan, sehingga masyarakat merasa hal ini akan berimbas pada tahap pelaksanaan nantinya

b. Pendampingan Pelaksanaan Program Pembangunan

Respondem menilai pendampingan yang dilakukan pada pelaksanaan pembangunan dilapangan kurang baik dengan persentase 71.8% (51 orang) hal ini didasari pertimbangan bahwa pendamping desa kurang intensif dilapangan bersama masyarakat yang

sedang melakukan kegiatan pembangunan. Walaupun begitu sebagian responden menilai bahwa pendampingan yang dilakukan sudah cukup baik dengan persentase 28.2% (20 orang) hal ini didasari pertimbangan bahwa pendampingan yang dilakukan pendamping desa sudah cukup intensif baik

c. Pendampingan Pengawasan Pembangunan

Responden menilai pendampingan yang dilakukan pendamping desa pada pengawasan pembangunan dilapangan kurang baik dengan persentase 57.7% (41 orang) hal ini didasari pertimbangan bahwa pendamping desa kurang intensif mengawasi masyarakat dilapangan sehingga menurut masyarakat terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan dan seharusnya mendapatkan peneguran serta pembinaan langsung oleh pendamping desa. Walaupun begitu sebagian responden juga menilai bahwa pendampingan yang dilakukan sudah cukup baik dengan persentase 40.8% (29 orang) nilai baik dengan persentase 1.4% (1 orang).

4. Kemampuan Pendamping Desa

Responden menilai bahwa kemampuan pendamping desa pada pengawasan pembangunan dilapangan cukup baik dengan persentase 56.3% (40 orang) dan baik dengan persentase 28.2% (20 orang) hal ini didasari pertimbangan bahwa pendamping desa sebagai orang yang dipercaya oleh pemerintah dan di salurkan ke

wilayah pedesaan untuk mendampingi masarakat dalam melaksanakan pembangunan khusus yakni melalui INBUP-PPIP pastinya memiliki kemampuan dan keahlian sehingga masyarakat percaya akan kemampuan dari sosok pendamping desa tersebut walaupun terkadang hubungan pendamping desa dan masyarakat terlihat kurang intensif. Sedangkan responden yang memberikan penilaian kemampuan pendamping desa kurang baik dengan persentase 15.5% (11 orang) dengan alasan bahwa pendamping desa masyarakat mengharapkan pendamping desa bukan hanya mampu secara teknis tetapi juga harus mampu secara emosional untuk tegas terhadap intervensi kepentingan yang membuat pembangunan lepas kendali.

5. Komunikasi Pendamping Desa

Penilaian responden terhadap komunikasi yang dilakukan pendamping desa dalam kegiatan pembangunan kurang baik dengan persentase 87.3% (62 orang) dan tidak baik dalam kegiatan pembangunan di desa dengan persentase 1.4% (1 orang) hal ini juga tidak lepas dari setiap kegiatan pendampingan yang intensitas kehadirannya dilapangan yang tidak teratur dan cenderung kurang dekat dengan masyarakat. Selain itu juga terdapat Penilaian responden bahwa komunikasi pendamping cukup baik 11.3% (8 orang).

6. Tanggung Jawab Pendamping Desa

Penilaian responden terhadap Tanggung Jawab yang dimiliki pendamping desa dalam menjalankan tugas sudah cukup baik dengan persentase 70.42% (50 orang), baik 12.7% (9 orang) hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam beberapa pembangunan yang menggunakan dana besar didampingi secara intensif, Penilaian responden kurang baik 16.9% (12 orang) dengan alasan bahwa ada beberapa hasil pembangunan yang mengecewakan yakni pada tahun 2013 tidak sampai pada tahap evaluasi.

7. Kendala Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur

Responden menilai bahwa kendala yang paling sering terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur pedesaan yakni pada tahap pelaksanaan 70.4% (50 orang) dengan alasan bahwa terdapat beberapa kesulitan yang dirasakan masyarakat seperti mengangkut material pembangunan dari kota menuju Desa Sekodi yang jauh, sehingga dibutuhkan dana lebih (tambahan) untuk mengangkut barang-barang tersebut, serta pemahaman masyarakat akan anggaran dana pembangunan dan swadaya yang masih belum dipahami secara luas.

8. Intervensi Kepentingan

Tingkat intervensi tinggi di sebabkan responden selalu terjadi intervensi dengan persentase 90.1% (64 orang) dan Kadang terjadi 9.9% (7 orang) hal ini dianggap

masyarakat sebagai suatu hal yang biasa dalam pembangunan yakni adanya intervensi dari pihak tertentu yang memiliki pengaruh dalam perkembangan dan pembangunan desa.

9. Hasil Pembangunan Dengan Adanya Pendamping Desa

Penilaian responden cukup baik dengan persentase 85.9% (61 orang) terhadap hasil pembangunan dengan adanya pendampingan desa, hal ini didasari bahwa PDP telah berusaha melakukan peninjauan lokasi (survey) terhadap kondisi infrastruktur Desa Sekodi dan melakukan peninjauan kembali terhadap lokasi yang menjadi usulan dari masyarakat untuk dilakukan pembangunan infrastruktur

10. Keberlanjutan Program Pendampingan Desa

Responden setuju 45.1% (32 orang) dengan program pendampingan desa bahkan layak untuk dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat desa memang butuh orang yang ahli dalam membimbing mereka untuk melakukan pembangunan yang baik dan terarah, sehingga tidak melanggar hukum yang bisa menjerat mereka. Namun, sebagian dari Masyarakat (responden) kurang setuju 45.1% (32 orang) dengan program pendampingan desa walaupun memang layak untuk dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat desa sangat membutuh orang yang ahli dalam membimbing mereka untuk

melakukan pembangunan yang baik dan terarah, sehingga tidak melanggar hukum yang bisa menjerat mereka, selain itu pendamping desa adalah orang kepercayaan pemerintah sehingga masyarakat yakin bahwa pendamping desa dalam pembangunan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur pedesaan, masyarakat desa sadar bahwa di Desa Sekodi sumber daya manusianya rendah, rata-rata kepala keluarga yang ikut aktif dalam pembangunan hanya berpendidikan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah, sangat sedikit yang berpendidikan tinggi. Selain itu terdapat responden tidak setuju dengan persentase 9.9% (7 orang) bahwa program pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan tidak perlu dilanjutkan, dengan alasan bahwa masih banyak terjadi kelemahan dalam pembangunan dan pada tahun 2013 kegiatan pembangunan tidak sampai pada tahap evaluasi, seharusnya pendamping desa lebih mentuntaskan permasalahan itu, walaupun begitu masyarakat dengan sadar menghargai kerja keras pendamping desa selama ini.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak akan lepas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat

sangat dibutuhkan, karena masyarakat desa sebagai masyarakat tempatan adalah orang yang sangat tahu akan kebutuhan pembangunan di desanya. Partisipasi masyarakat yang dilihat adalah partisipasi yang meliputi:

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyusun rencana infrastruktur yang ingin dibangun melalui proses musyawarah desa untuk mencapai kata mufakat, serta tidak lepas dari penyampaian ide dan gagasan atas usulan sebagai berikut:

1. Musyawarah Perencanaan Program pembangunan

Keikutsertaan responden masih kadang-kadang meluangkan waktu untuk ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan desa dengan persentase 53.5 % (38 orang) bahkan tidak pernah mengikuti musyawarah untuk perencanaan pembangunan desa dengan persentase 14.1% (10 orang), dalam musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan hal ini di pengaruhi oleh sikap masyarakat yang lebih mempercayai perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat dalam pembangunan serta menganggap bahwa sebagai masyarakat biasa mereka akan kurang dilibatkan dalam penentuan arah pembangunan, selain itu sebagian responden selalu mengikuti musyawarah desa dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 32.4% (23 orang).

2. Penyampaian Ide Dan Gagasan Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keikutsertaan responden dalam penyampaian ide dan gagasan pembangunan hampir tidak pernah dengan persentase 46.5% (33 orang) dan kadang-kadang menyampaikan ide dengan persentase 39.4% (28 orang) hal ini di dasari alasan bahwa masyarakat menganggap bahwa ide dan gagasan yang diajukan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap punya kedudukan dan usulannya dianggap selalu di dengar seperti Kepala Dusun, RT, RW, dan pihak-pihak yang dianggap tokoh dalam masyarakat dan responden yang selalu memberikan ide dan gagasan dalam musyawarah pembangunan dengan persentase 14.1% (10 orang)

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Gotong Royong Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keikutsertaan responden dalam pembangunan cukup baik dengan intensitas selalu mengikuti 69.0% (orang) dan kadang-kadang mengikuti gotong royong dalam

pembangunan infrastruktur pedesaan dengan persentase 31.0% (22 orang) dengan alasan bahwa masyarakat merasakan bahwa gotong royong adalah kegiatan penting di desa terutama dalam pembangunan infrastruktur desa, karena secara fisik Desa Sekodi sangat membutuhkan infrastruktur pembangunan yang baik dan bisa bermanfaat untuk melancarkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat adalah bentuk kekuatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsih pembangunan baik berupa material maupun non material, Partisipasi masyarakat (responden) dalam bentuk swadaya bisa dilihat dari uraian dibawah ini:

- Swadaya Tenaga

Responden selalu berswadaya tenaga dengan persentase 74,6% (53 orang), hal ini di dasari kesadaran bahwa pentingnya memberikan sumbangan tenaga untuk meningkatkan pekerjaan agar mencapai over prestasi. Selain itu responden kadang-kadang berswadaya tenaga dengan persentase 25.4% (18 orang) hal ini didasari kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih memilih pekerjaan seharinya.

- Swadaya Dana

Responden 100% (71 orang) tidak pernah memberikan swadaya dalam bentuk sumbangan dana hal ini disebabkan masyarakat sudah

mengetahui bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Dana INBUP-PPIP sudah teranggarkan dan Rp.1.000.000.000 (satu miliar) di setiap desa sehingga pembangunan infrastruktur desa akan menunggu dana INBUP tersebut cair.

- **Swadaya Material**

Sebagian responden tidak pernah memberikan swadaya material dalam pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 69.0% (49 orang), hal ini didasari keadaan ekonomi masyarakat yang tidak semua memiliki lahan tanah yang luas dan tidak semua dari mereka ingin memberikan lahan dengan sukarela yang penting dalam membantu pembangunan, yang lebih penting lagi adalah sumbangan dalam bentuk tenaga. Responden yang kadang-kadang memberikan swadaya material dengan persentase 21.1% (15 orang) dan selalu dengan persentase 9.9% (7 orang) hal ini didasari kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat penting.

3. **Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Responden selalu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dengan persentase 54.9% (39 orang) dan kadang-kadang 36.6% (26 orang) hal ini didasari alasan bahwa pembangunan yang masuk ke desa dan dijalankan oleh masyarakat sendiri sudah pasti menjadi tanggung jawab terutama dalam pelaksanaan masyarakat

berusaha untuk meluangkan waktunya dalam bergotong royong, bahkan memberikan sumbangan tenaga untuk pekerjaan yang dinilai perlu penambahan dari target pembangunan hal ini dilakukan supaya masyarakat benar-benar merasa dipedulikan, terdapat juga responden yang tidak pernah merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dengan persentase 8.5% (6 orang)

c. **Partisipasi Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan adalah bentuk keikutsertaan masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan yang sedang berjalan di desa, pengawasan ini penting dilakukan karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga tetap harus peka terhadap pelaksanaan pembangunan dengan saling mengawasi sebagai berikut:

1. **Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Keikutsertaan responden masih kadang-kadang dalam mengawasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan persentase 49.3% (35 orang) dan selalu melakukan pengawasan terhadap dengan persentase 43.7% (31 orang) hal ini didasari bahwa tidak semua masyarakat memiliki waktu yang intensif untuk selalu mengawasi sehingga, pada jam tertentu saat mereka tidak sibuk bekerja maka

pada saat itu mereka akan turun lapangan ikut membantu pekerjaan infrastruktur desa sambil mengawasi kualitas pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kecurangan, responden yang tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dengan persentase 7.0% (5 orang), hal ini didasari bahwa pengawasan hanya dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan atau orang-orang yang dianggap penting di desa, karena mereka yang lebih mengetahui seluk beluk pembangunan, anggapan pesimis dari masyarakat bahwa walaupun mereka mengawasi dan menegur apabila terjadi kecurangan tetap saja tidak di perhatikan sehingga masyarakat merasa tidak perlu mengawasi.

2. Penyampaian Kecurangan Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keikutsertaan responden kadang-kadang 53.5% (38 orang) dan selalu 32.4% (23 orang) menyampaikan kecurangan dalam pembangunan hal ini didasari alasan bahwa sangat penting menyampaikan kecurangan dalam pembangunan baik pada tahap pelaksanaan lapangan maupun pada penganggaran biaya pembangunan, walupun terkadang laporan kecurangan yang disampaikan tidak terlalu di tanggap, responden yang tidak pernah menyampaikan kecurangan dalam pembangunan dengan persentase 14.1% (10 orang) hal ini didasari alasan bahwa kecurangan yang di sampaikan kepada pihak

berwenang selalu tidak diperhatikan apalagi jika pengaduan berasal dari masyarakat biasa.

d. Partisipasi Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pelestarian dalam hasil pembangunan adalah bentuk keikutsertaan dan kepedulian masyarakat melestarikan pembangunan yang sudah dibangun kegiatan ini meliputi:

1. Penjagaan Hasil Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keikutsertaan responden selalu dalam menjaga hasil pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 67.6% (48 orang) dan Kadang-kadang dengan persentase 28.2% (20 orang), hal ini didasari bahwa pentingnya menjaga hasil pembangunan agar bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, dan yang bekerja membangun infrastruktur desa tersebut adalah masyarakat desa sekodi sehingga sangat penting menjaganya demi kepentingan bersama, terdapat responden yang tidak pernah merasa untuk bertanggung jawab dalam menjaga hasil pembangunan dengan persentase 4.2% (3 orang)

2. Pemanfaatan Hasil Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keikutsertaan responden selalu memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 100% (71 orang), hal ini didasari alasan bahwa pembangunan yang telah dibangun harus di manfaatkan

dengan sebaik mungkin karena pembnagunan tersebut direncanakan dan dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri untuk menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat desa.

3. Pengawasan Dalam Pemeliharaan Hasil Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Responden selalu melakukan pengawasan dalam memelihara hasil pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 47.9% (34 orang) serta kadang-kadang mengawasi pemeliharaan hasil pembangunan dengan persentase 39.4% (28 orang), hal ini di menunjukkan bahwa masyarakat peduli akan kemanfaatan dari pembangunan yang dibangun harus diawasi dan dijaga serta dilestarikan supaya bermanfaat dalam jangka waktu yang lama, selain itu terdapat responden tidak pernah melakukan pengawasan dalam memelihara hasil pembangunan infrastruktur desa yang dengan persentase 12.7% (9 orang)

e. Penerimaan Hasil Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Penerimaan hasil pembangunan adalah hal yang penting dilakukan karena disini akan terlihat bagaimana masyarakat merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan, kesesuaian dengan rencana pembangunan terhadap hasil serta adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pembangunan yang dilaksanakan. Responden selalu

menerima hasil pembangunan infrastruktur desa dengan persentase 83.0% (60 orang), hal ini didasari bahwa pembangunan yang dibangun adalah suatu kegiatan bersama yang patut dihargai dan di banggakan, terdapat beberapa responden yang kadang-kadan menerima hasil pembangunan dengan persentase 17.0% (11 orang) hal ini didasari alasan bahwa masyarakat tidak semuanya menerima hasil pembangunan disebabkan adanya kecurangan-kecurangan pembangunan yang tidak jelas pertanggungjawabannya, bahkan ada pembangunan yang tidak sampai pada tahap evaluasi kegiatan berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang efektivitas pendampingan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, peneliti simpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah di bahas sesuai dengan kerangka acuan berfikir, kesimpulan peneilitan dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Efektivitas pendampingan desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dalam penguatan infrastruktur pedesaan yang dikenal dengan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (INBUP-PPIP) di tengah masyarakat masih kurang efektif, hal ini bisa

dilihat dari deskripsi jawaban responden yakni:

- a. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tahu tentang keberadaan pendamping desa, kehadiran pendamping desa, pendampingan pada pelaksanaan program, pendampingan pada pengawasan pembangunan, komunikasi pendamping desa, dinilai kurang baik
 - b. Masyarakat masih kurang setuju 45.1% (32 orang) dengan keberlanjutan program bahkan ada masyarakat yang tidak setuju 9.9% (7 orang) dengan adanya pendampingan, serta kendala pembangunan yang terjadi di desa masih perlu pembenahan yang kuat dari sosok pendamping desa harus benar-benar mampu dan rutin menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa, sehingga penilaian masyarakat lebih baik lagi. Walaupun begitu sebagian responden tetap ada yang menginginkan keberlanjutan program pendampingan desa dengan persentase yang hampir seimbang yakni 45.1% (32 orang).
 - c. Adanya penilaian positif masyarakat terhadap pendamping desa yakni sosialisasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat pada pendampingan perencanaan program, kemampuan pendamping desa, sikap bertanggung jawab yang dimiliki pendamping desa serta respon masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan adanya pendamping desa cukup baik.
2. Partisipasi masyarakat Desa Sekodi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan pada tingkat sedang jika dilihat dari deskripsi jawaban responden yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang kurang aktif, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa dan keikutsertaan masyarakat dalam penyampaian ide dan gagasan yang masih kadang-kadang dilakukan dan tidak aktif.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup aktif, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam gotong royong, tanggung jawab pembangunan, serta swadaya tenaga dalam pelaksanaan pembangunan selalu dilakukan, walaupun swadaya material masih rendah, dan swadaya dana tidak pernah dilakukan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa kurang aktif, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan penyampaian kecurangan pada pembangunan infrastruktur masih kadang-kadang dilakukan.
 - d. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan infrastruktur desa cukup aktif dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menjaga hasil

serta pemanfaatan hasil pembangunan yang selalu dilakukan, walaupun pengawasan dalam pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur yang masih kurang aktif.

- e. Partisipasi masyarakat dalam penerimaan hasil pembangunan oleh masyarakat dinilai tinggi dilihat dari respon masyarakat yang hampir selalu menerima hasil pembangunan infrastruktur desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden tentang efektivitas pendampingan desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah
Kepada pemerintah diharapkan supaya mengaktifkan tenaga pendamping desa dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat sebagai sosok yang ahli dan memiliki kemampuan untuk membimbing masyarakat dalam pembangunan
2. Tokoh Masyarakat/ Masyarakat
Tokoh Masyarakat diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam memberikan usulan prioritas pembangunan yang objektif tanpa ada kepentingan tertentu, serta masyarakat dalam pembangunan harus aktif menentukan arah pembangunan yang efektif untuk kepentingan bersama. Masyarakat juga

diharapkan keterbukaannya terhadap agen pembangunan desa

3. Peneliti lanjutan

Diharapkan penelitian tentang pendampingan desa ini bisa dilanjutkan dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas lagi sehingga bisa menggambarkan fenomena penelitian yang lebih besar dan bisa bermanfaat bagi pembaca secara luas, dan terutama untuk pihak-pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan untuk pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basrowi, MS. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press
- Handyaningrat, Soewarno. 1966. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Horton, Paul B dan Chaeter L Hunt. 1984. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Johnson, Doyle Paule. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaruan Desa "Bertumpu Pada Yang Terbawah"*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ritzer, George. D dan Dogulas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi "Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodren"*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sajogyo, dan Pudjiwati Sajogyo. 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siagian, P Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sosrodihardjo, Soedijto. 2001 *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tjondronogoro, Soediono. 1999. *Keping-Keping Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, S dan Durachman, Budi. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.

Sumber Lain

Buku Petunjuk Teknis Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Desa (INBUP-PPIP)

Peraturan Bupati Nomor: 158/KPTS/III/2013. Tentang: Pengangkatan Tenaga Pendamping Pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penguatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkalis 2013.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2010. Sensus Penduduk 2010. Tersedia <http://sp2010.bps.go.id>. Diakses tanggal 23-02-2014 pukul 08.00 WIB.